KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

HP5JKZ4E

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

//										
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 I	A.1 NPWP : 15 483 854 4 722 000									
A.2 I	A.2 NIK :									
A.3 Nama : HARDIANTO										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7			
4 21-402-01			4.500.000	4.500.000	0	5	225.000			
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04392/LS-THR/RSJD.AHM/2022										
Nama Dokum				en Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy						
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor: Tanggal dd mm yyyy									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0										
C.2 Nama Instansi Pemerintah :			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi :										
C.4	.4 Tanggal		2 6	dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_		
C.5	<u></u>		• —							
				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	i berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	s mengatur bahwa s	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara		